

# Paradigma Kepariwisata Bali Tahun 1930-an: Studi Genealogi Kepariwisata Budaya

I Made Sendra

Fakultas Pariwisata Universitas Udayana

Email: [Sendramade65@gmail.com](mailto:Sendramade65@gmail.com)

## Abstract

This article analyses the connection between Baliseering discourse and the practice of Bali's cultural tourism by applying the theory of hegemony from Gramsci and genealogy from Micheal Foucault as tools of analysis. It is very interesting topic to analyses especially in relation to the reconstruction of Baliseering discourse, the power knowledge emerged from Baliseering discourse, the articulation of it to open the space of Bali as historical cultural. Research shows that Baliseering is colonial discourse constructed by the Dutch government having purpose, such as: (a) to stem the influence of nationalism and moslem radicalism movement from Jawa; (b) to utilize the unique conservative tradition and historical cultural landscape as tourist attraction. On the other hand, there were modern elites who had ideology called anti colonial discourse. They consisted of Balinese youth who had finished their study in Java brought modern thought. They applied soft struggle by establishing social, cultural and religious organization called Bali Darma Laksana (BDL). They criticized the Baliseering discourse as deceptive instrument by glorifying the conservative unique tradition and culture in order to create dissension among Balinese people.

**Key words:** genealogy, hegemony, *Baliseering*, Bali tourism

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara wacana *Baliseering* dengan praktik kepariwisataan budaya Bali, dengan menggunakan teori hegemoni dari Gramsci dan genealogi dari Michael Foucault sebagai pisau analisis. Topik ini menarik dikaji untuk melihat bagaimana wacana *Baliseering* dikonstruksi, kuasa pengetahuan seperti apa yang menyertai wacana tersebut, dan apakah wacana *Baliseering* memiliki artikulasi untuk pembukaan ruang Bali sebagai destinasi kepariwisataan sejarah budaya. Hasil kajian menunjukkan, terdapat konstruksi kolonial Belanda di balik wacana *Baliseering* yang bertujuan, antara lain: (a) untuk membendung pengaruh nasionalisme dan gerakan radikalisme Islam dari Jawa; (b) menjadikan konservatisme dan keunikan

*landscape* tradisi budaya dan sejarah Bali sebagai daya tarik wisata. Di lain pihak terdapat elite modern Bali yang menganut paham anti wacana kolonial, terdiri dari para pemuda Bali yang telah tamat pendidikan di Jawa yang membawa paham modernisasi. Mereka menggunakan cara-cara lunak dengan mendirikan organisasi Bali Darma Laksana (BDL) yang bergerak di bidang sosial, agama dan pendidikan. Mereka mengkritisi wacana *Baliseering* sebagai instrumen pembodohan masyarakat Bali yang mengagungkan konservatisme tradisi budaya yang dapat memecah belah masyarakat Bali.

**Kata Kunci:** genealogi, hegemoni, *Baliseering*, pariwisata Bali

## Latar Belakang

Awal pembangunan keparwisataan Bali yang berwawasan budaya secara genealogis bisa dilacak pada era tahun 1930-an, ketika Belanda sudah berhasil menegakkan ketertiban dan keamanan di Bali, melalui serangkaian perang, seperti Perang Puputan Badung (1906) dan Perang Puputan Klungkung (1908). Pada tahun 1910, setelah situasi keamanan dipulihkan maka Bali masuk ke dalam *Pax Nederlandica*, yaitu tatanan politik ketatanegaraan persemakmuran semu di bawah pimpinan Ratu Wilhelmina (Raja Belanda). Konsep persemakmuran semu ini direalisasikan dalam bentuk kebijakan politik etis yang pada prinsipnya mengakui adanya kewajiban moral dari pemerintah kolonial terhadap bangsa pribumi. Implikasi dari kebijakan yang baru ini membawa administrasi kolonial menyentuh ke tengah-tengah masyarakat mengatasnamakan perdamaian, ketertiban hukum kolonial (*rust en order*) dan kemakmuran masyarakat yang dijajah (Ardika, dkk: 2015: 467-468).

Salah satu program kebijakan politik etis adalah praktik Balinisasi (*Baliseering*), yang menggali eksotisme, konservatisme, keunikan dari tradisi, budaya dan sejarah Bali. Keunikan tradisi budaya dan keindahan alam serta lanskap kehidupan pedesaan dijadikan komoditas pariwisata untuk menarik para turis mancanegara berkunjung ke Bali. Tradisi, budaya,inggalan-tinggalan arkeologi dan sejarah Bali kuno dijadikan sebagai ikon daya tarik wisata yang akan mengkonstruksi ruang Bali sebagai daya tarik wisata sejarah dan budaya (*historical cultural landscape/ HCL*). Keterkaitan keparwisataan budaya dengan wacana

*Baliseering* sangat menarik dikaji, untuk melihat keterkaitan antara paradigma kepariwisataan budaya Bali, dengan wacana *Baliseering* yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda periode 1930-an. Konstruksi episteme kepariwisataan sejarah dan budaya jika dilihat dari perspektif ruang dan waktu, secara diakronis meliputi kurun waktu zaman kolonial (1930) sampai zaman Jepang (1942). Wacana (diskursus) yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda disebut *Baliseering*, didukung oleh institusi pemerintahan kolonial Belanda dengan tokohnya Residen Bali-Lombok bernama Brouweker (Brouweker, 1932: 144; Ardika, dkk: 2015: 473).

Penelitian wacana *Baliseering* dalam kaitan dengan paradigma kepariwisataan budaya Bali menjadi penting untuk dikaji dari perspektif diakronis untuk merekonstruksi diskursus, institusi penopang, dan tokoh (agen) yang menciptakan wacana tersebut. Penelitian ini difokuskan pada paradigma kepariwisataan budaya pada zaman kolonial, melalui wacana Balinisasi (*Baliseering*) yang dirancang oleh pemerintahan kolonial Belanda. Wacana ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional, bahwa pemerintah kolonial Belanda secara serius bertekad meningkatkan kemakmuran masyarakat pribumi, setelah penaklukkan berdarah melawan raja-raja Bali dalam perang puputan yang dilakukan oleh raja Badung dan raja Klungkung.

Dalam kajian ini dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan paradigma kepariwisataan Bali pada zaman kolonial Belanda, yaitu (1) Bagaimanakah wacana Balinisasi (*Baliseering*) dikonstruksi pada tahun 1930-an? (2) Kuasa pengetahuan (*power knowledge*) seperti apa yang menyertai wacana tersebut?; (3) Apakah wacana *Baliseering* memiliki artikulasi untuk menjadikan Bali sebagai destinasi kepariwisataan budaya?

### **Teori Analisis**

Kepariwisataan budaya adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan pada kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu dan falsafah *Tri Hita Karana* sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian

budaya dan lingkungan (Perda Bali No. 2. Tahun 2012, Bab I, Pasal 1, Ayat 12). Dengan demikian, Kepariwisata Bali dalam tataran praktiknya yang ideal adalah kepariwisataan budaya berbasis Agama Hindu dan falsafah *Tri Hita Karana*, dengan motivasi untuk mengawinkan struktur industri jasa pariwisata dengan struktur Budaya Bali secara produktif sehingga melahirkan sistem kelembagaan yang kuat.

Pada level teori, penelitian ini menggunakan teori hegemoni dari Gramsci dan geneologi dari Foucault sebagai pisau analisis. Hegemoni dimaknai sebagai pemenangan pemikiran kelas yang berkuasa lewat penguasaan basis-basis pemikiran (kognitif), kemampuan kritis masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat kedalam pola kerangka pikiran yang ditentukan lewat birokrasi. Gramsci meletakkan pengertian hegemoni dalam konteks pelaksanaan politik dalam dua arti yaitu: (1) pelaksanaan politik yang melibatkan tindak kekerasan, penindasan dengan menggunakan senjata, penyiksaan fisik dan intimidasi; (2) pelaksanaan politik dalam upaya penguasaan intelektual dan moral. Dalam arti kedua ini, penguasaan melibatkan cara-cara kultural dan intelektual untuk melumpuhkan kesadaran kritis masyarakat yang dikuasai. Dalam hal ini digunakan kekuatan persuasif negara melalui berbagai institusi, seperti pendidikan dan agama yang secara sengaja dikuasai oleh negara. Melalui hegemoni, negara melaksanakan ideologinya kepada masyarakat. Negara merekayasa kesadaran masyarakat, sehingga tanpa disadari kesadaran itu mendukung kekuasaan negara. Proses hegemoni berlangsung canggih dan halus karena menyasar pada kesadaran-kesadaran yang menentukan pikiran-pikiran, perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan masyarakat (Bocock, 1986:33). Hal ini diterapkan melalui pelibatan para intelektual dalam birokrasi pemerintah serta intervensi melalui lembaga-lembaga pendidikan dan seni oleh negara (Takwin, 2009:73-74; Simon, 2001:19). Penggunaan teori hegemoni dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek penguasaan konsensus atau tanpa kekerasan, terkait dengan perubahan sistem politik penguasaan dari cara peperangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda ke politik diplomasi kebudayaan.

Selanjutnya, digunakan geneologi dari Foucault guna menjelaskan sejarah ilmu pengetahuan dan bagaimana konstruksi

ilmu atau wacana ilmiah (konsep dan teori) yang berbeda setiap era bisa terjadi. Foucault menyebut adanya *episteme* (paradigma) yang mengkonstruksi wacana ilmiah secara berbeda setiap era (zaman). Dalam geneologi, kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan bersumber dari upaya manusia untuk memahami dan menyingkap rahasia alam, manusia dan budayanya yang berbeda dalam ruang dan waktu. Oleh karena itu, ia menolak kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan yang mutlak dan universal. Perhatian Foucault bukan bertitik tolak dari apa yang benar, akan tetapi bagaimana versi kebenaran menjadi diterima dan dominan pada suatu era (zaman). Ada dua istilah yang digunakan oleh Foucault untuk menjelaskan tentang kebenaran tersebut, yaitu (a) *savoir* berkaitan dengan pengetahuan formal, gagasan filosofis, konseptual, praktik, prosedur, institusi formal dan norma-norma keilmiah; (b) *connaissance* adalah badan-badan pengetahuan khusus, keilmiah formal (buku-buku, jurnal ilmiah, dan teori-teori filosofis) yang bisa muncul menggantikan.

Lebih lanjut Foucault mengatakan kajian tentang wacana secara esensial adalah kajian tentang kekuasaan. Wacana dibangun atas dasar fondasi kekuasaan. Wacana yang diterima pada masa tertentu secara implisit menentukan dengan cara apa, dan atas argumentasi (rasionalitas) apa suatu wacana dibangun. Kebenaran akan argumentasi wacana sebagai bentuk keinginan untuk berkuasa dan keinginan mempertahankan *status quo* ilmu pengetahuan menjadi hegemoni. Oleh karena itu, dalam setiap masyarakat, produksi diskursus selalu dikontrol, diseleksi, didistribusikan oleh kekuasaan berdasarkan prosedur yang pasti. Tujuan kontrol produksi diskursus ini untuk mempertahankan kekuasaan dan melindunginya dari berbagai ancaman serta upaya melemahkannya. Jadi dalam kerangka pemikiran Foucault, untuk menganalisis fenomena sosial budaya bisa dianalisis dari tiga aspek, yaitu (1) wacana (diskursif) meliputi bagaimana wacana itu diproduksi, darimana wacana itu berasal, dimana wacana itu berada; seperti apa relasi-relasi yang ada dalam wacana tersebut, serta kekuatan apa yang menyertai wacana tersebut; (2) institusi penopang; dan (3) tokoh (keagenan).

Berbicara mengenai wacana, erat kaitannya dengan bahasa. Bahasa sebagai sistem pikiran dan gagasan dalam tataran wacana untuk memahami realitas sosial-budaya. Wacana adalah cara

yang dipergunakan untuk mengetahui dan menjelaskan realitas, maka wacana menjadi penting yang membentuk kuasa wacana atas cara berpikir dan kesadaran manusia. Wujud konkret dari wacana adalah ilmu pengetahuan yang telah terinstitusionalisasi lewat lembaga-lembaga formal, seperti sekolah, penjara, rumah sakit akan menghasilkan kuasa wacana (*power-knowledge*), yang akan mengkonstruksi dan mendisiplinkan subjek (individu). Kuasa wacana yang mengatur kehidupan individu pada populasi massa disebut *bio-power*. *Power* menurut Foucault tidak tunggal, bukan dominasi pasar atau modal, karena *power* terspesialisasikan melalui ilmu pengetahuan. Oleh karena itu *power* terpluralisasi dan terdesentralisasi. Lebih lanjut Foucault (dalam Lubis, 2014:85) menjelaskan adanya hubungan erat antara wacana (diskursus) dengan kekuasaan. Produksi wacana selalu diseleksi, dikontrol, didistribusikan oleh kekuasaan berdasarkan prosedur atau aturan yang pasti. Tujuan produksi wacana adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan melindungi dari berbagai ancaman serta upaya untuk melemahkannya.

Faktor kekuasaan menjadi penting dalam pertarungan *wacana* agar bisa diterima. *Wacana* yang diterima pada masa tertentu secara implisit menjelaskan dengan cara apa atau atas fondasi apa argumen (rasionalitas) suatu wacana dibangun. Karena itu ada beragam cara berpikir, cara menyatakan sesuatu, menyebabkan wacana bersifat *multivocal* (plural) yang dilakukan oleh tokoh (agen) dan institusi penopangnya. Ada berbagai perspektif, kepentingan dan kuasa yang berbeda dalam membentuk wacana. sesuai dengan jamannya (*zeitgeist*). Bahasa sebagai sistem pemikiran dan gagasan dalam tataran wacana. Wacana sebagai satu-satunya cara bagi manusia untuk mengetahui, memahami, menjelaskan tentang realitas (dunia). Oleh karena itu, wacana merupakan faktor penting yang membentuk pengetahuan dan kesadaran manusia (kuasa wacana). Jalinan hubungan antara bahasa, pikiran, pengetahuan dan tindakan oleh disebut Foucault disebut “praktik diskursif”. Dalam pendekatan genealogis sangat penting bagi peneliti untuk mengungkapkan apa yang terdapat di balik (sesuatu yang tersembunyi) yang memunculkan dan membangun sebuah wacana dalam kurun waktu tertentu. Genealogi dapat dikatakan sebagai analisis hubungan historis antara kekuasaan dengan diskursus. Kritisisme dihadapkan pada proses yang terdapat dalam diskursus.

Ilmu pengetahuan berperan membentuk manusia dan kekuasaan (aturan) digunakan untuk mengatur subjek (manusia).

### **Episteme Politik Etis dan *Baliseering* sebagai Wacana Kolonial**

Kebijakan politik etis (politik balas budi) sengaja dikonstruksi oleh pemerintah kolonial Belanda, untuk memperbaiki citra (*image*) penjajahan kolonial Belanda dengan cara mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pribumi. Kebijakan ini dilakukan sebagai akibat dari penaklukan berdarah terhadap raja-raja di Bali yang melakukan strategi *perang puputan*. *Perang puputan* yang dilakukan oleh prajurit raja Badung (1906) dan raja Klungkung (1908), bertujuan untuk menghindari agar tidak menjadi tawanan Belanda. Para prajurit yang tidak menyinggal dalam pertempuran melakukan tindakan bunuh diri Altruistik (Johnson, 1994:192).

Tindakan bunuh diri altruistik yang dilakukan oleh prajurit Kerajaan Badung dilandasi oleh ajaran sastra, seperti disebutkan dalam *Geguritan/Kidung Buwanawinasa Pupuh Durma* Bait 18, berikut "...*prasihna nikang lirang, sang prawira anungkap lwih....*" (demikianlah alamat meninggalnya orang yang prawira akan naik sorga) (Nordolt, Putra, dan Creese, 2006:159). Sebelum tindakan bunuh diri altruistik ini dilakukan, para prajurit Kerajaan Badung tidak mau menyerah, dengan keris terhunus mereka terus maju menyerang dan dibalas oleh pasukan Belanda dengan tembakan sampai tidak ada pasukan yang tersisa. Hal ini memberikan *image* yang memalukan bagi pemerintah kolonial Belanda, yang melakukan perang dengan cara pembunuhan habis-habisan (*genocide*), sehingga mendapatkan kritikan keras dari dunia internasional. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda ingin memperbaiki pencitraan kepada dunia internasional, dengan menerapkan kebijakan politik etis (balas budi). Kebijakan politik ini menurut Belanda bertujuan meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan dan kemakmuran, perlindungan terhadap tradisi dan budaya masyarakat melalui wacana Balinisasi (*Baliseering*). Kebijakan politik etis juga diterapkan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah kolonial Belanda sudah berhasil mewujudkan ketertiban dan keamanan (*rust en order*) di daerah-daerah jajahannya (Picard, 2006).

Kebijakan politik etis ini diwujudkan dengan membangun wacana Balinisasi (*Baliseering*) yang mulai diterapkan pada tahun 1930-an. Tujuan wacana ini adalah mempertahankan Bali sebagai



museum hidup (*living museum*) dari kelanjutan warisan budaya Hindu Majapahit yang mulai punah akibat dari proses Islamisasi di Tanah Jawa pada abad ke-5. Asumsi pemerintahan kolonial Belanda adalah agama Hindu merupakan praktik religi kehidupan tradisi dan kesenian masyarakat Bali akan dapat menjamin keutuhan budayanya. Institusi pendidikan formal menjadi sangat penting untuk mewujudkan wacana ini dalam tatanan praktek diskursif. Dengan meminjam konsep Foucault (2014), pemerintah kolonial Belanda menerapkan konsep *bio-power* dan *power knowledge* (kuasa wacana), melalui institusi pendidikan. *Bio-power* sebagai suatu bentuk kekuasaan pemerintah kolonial, bertujuan untuk membentuk dan mengonstruksi kesadaran kaum muda terhadap pengetahuan kekayaan warisan budaya masa lalunya, sehingga masyarakat bisa mempertahankan konservatisme kehidupan tradisional mereka dalam tatanan suasana perdamaian dan ketertiban (*rust en order*) hukum kolonial Belanda.

Namun sesungguhnya terdapat tujuan tersembunyi di balik wacana *Baliseering* yang bisa menjelaskan dasar-dasar argumen (rasionalitas) wacana itu dikonstruksi, yaitu (a) pemerintah kolonial Belanda ingin melakukan perubahan strategi penjajahan dari politik penaklukan (perang) menuju politik diplomasi kebudayaan. Salah satu cara mewujudkan diplomasi kebudayaan adalah menjadikan Bali sebagai benteng pertahanan, untuk membendung gelombang radikalisme Islam dan pergerakan nasional Indonesia yang telah memproklamkan Sumpah Pemuda. Sumpah pemuda melahirkan embrio trisakti dalam perjuangan pergerakan nasional, yaitu bertanah air satu, berbangsa satu dan berhasa satu menuju Indonesia merdeka.; (b) membendung usaha yang dilakukan oleh para misionaris dari Eropa melalui gerakan *Zending* yang ingin meng-Kristen-kan Bali; (c) pemerintahan kolonial Belanda memandang Bali laksana taman Firdaus, dipenuhi mozaik ribuan tempat peribadatan (*pura*) dan konservatisme tradisi budaya yang eksotik, unik, namun juga rapuh dari gempuran arus modernisasi Barat. Oleh karena itu, perlu dilindungi dan menjadi tugas penguasa kolonial Belanda berdasarkan prinsip paternalisme dalam sistem administrasi dan birokrasi kolonial. G.P. Roufaer seorang direktur *Bali Instituut* memberikan gambaran singkat tentang sikap administrasi kolonial Belanda, antara lain:



*“Let Balinese live their own beautiful native life as undisturbed as possible. Their agriculture, their village-life, their own form of worship, their religious art, their own literature – all bear witness to an autonomous native civilization of rare versatility and richness. No railroad on Bali; no western coffee plantations, and especially no sugar factories. But also no proselytizing, neither Mohammeden (by zealous natives from other parts of Indies), no Protestant, nor Roman Catholic. Let the colonial administration, with the strong backing of the Netherlands (home) government, that the island of Bali as a rare jewel, that we must protect and whose virginity must remain intact” (Picard, 2006: 27).*

Terjemahannya:

“Biarkanlah orang Bali meneruskan pola kehidupan pribumi mereka yang indah, bebas dari gangguan apapun. Pertanian mereka, kehidupan pedesaan mereka, aneka bentuk pemujaan, kesenian religius, dan kesusastaan mereka, semuanya itu menunjukkan suatu kebudayaan pribumi yang amat lentur dan kaya. Maka janganlah dibangun jalur kereta api di Bali. Jangan pula membuka perkebunan kopi Barat; dan terutama janganlah membuat pabrik gula. Tetapi jangan juga mengizinkan di Bali suatu kegiatan para misionaris agama, baik yang Islam (pribumi penuh semangat dari daerah-daerah Hindia Belanda lainnya), yang Protestan maupun yang Katolik Roma. Biarkanlah administrasi kolonial, dengan dukungan kuat pemerintah Belanda, memperlakukan Bali sebagai suatu permata langka yang wajib dilindungi dan keperawanannya dijaga utuh”.

Di lain pihak, terdapat gerakan pemuda yang berhaluan nasionalis yang menentang konservatisme tradisi, adat dan budaya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk melanggengkan kekuasaannya di Bali. Situasi ini menunjukkan adanya pertarungan wacana (*contested discourse*) antara wacana *Baliseering* (wacana kolonial) yang ingin mempertahankan konservatisme adat dan tradisi budaya Bali, di lain pihak terdapat kaum pemuda nasionalis yang anti wacana kolonial, berkeinginan untuk melakukan modernisasi terhadap tradisi dan budaya yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Tokoh-tokoh antiwacana kolonial terdiri dari para elite (kaum cendekiawan Bali) yang baru lulus dari sekolah-sekolah di Jawa yang berfaham modern. Para cendekiawan (elite) pribumi yang lulus dari sekolah Belanda dididik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan posisi administrasi kolonial Belanda.

Mereka justru mengecam orang Bali yang menerima sanjungan-sanjungan dari orang asing yang disebarkan oleh kaum

Orientalis yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk membendung pengaruh paham nasionalisme modern dari Jawa. Namun, mereka tidak bisa secara terang-terangan menentang wacana kolonialis, karena kuatnya kontrol kuasa penjajah (pemerintah kolonial) untuk melakukan kontrol terhadap munculnya wacana anti kolonial. Hal ini sejalan dengan pemikiran Foucault (dalam Lubis, 2014:85) mengatakan bahwa dalam setiap masyarakat produksi wacana (diskursus) selalu dikontrol, diseleksi dan didistribusi oleh kekuasaan. Tujuan kontrol ini untuk mempertahankan kekuasaan dan melindunginya dari berbagai ancaman serta upaya untuk melemahkannya.

Mereka yang anti wacana kolonial memilih strategi lunak (*soft strategy*) untuk menandingi wacana *Baliseering* dengan mendirikan organisasi yang bergerak dibidang pendidikan, sosial dan budaya. Pilihan *soft strategy* ini diterapkan, karena jika dilakukan perlawanan secara terbuka akan segera direpresi dan dibrangus oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam bingkai pemikiran Gramsci, pemerintah kolonial secara efektif memaksimalkan *repressive state apparatus* (RSA), yakni menggunakan instrument kekerasan legitimatif, sehingga dapat dikatakan dalam kontestasi ini kaum nasionalis dengan perspektif *anti Baliseering* menjadi wacana kecil (*small narrative*) terlibas oleh kuasa wacana kolonial, yakni *Baliseering* sebagai wacana besar (*grand narrative*).

Kaum nasionalis yang terdiri dari pemuda memproduksi wacana modernisasi sebagai antitesa terhadap wacana kolonial *Baliseering* dengan mendirikan organisasi Bali Darma Laksana (BDL). Organisasi ini merupakan fusi dari *Balische Studiefond* yang berdiri di Singaraja dengan perkumpulan Eka Laksana di Denpasar. Organisasi ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, agama dan adat istiadat. (*Djatajoe*, No. 1, Thn. II, Agustus 1937; No. 12, Thn. III, 25 Djuli 1939). Dalam bidang pendidikan organisasi ini memberikan tunjangan belajar bagi anggota-anggotanya. Tunjangan ini diberikan kepada pemuda Bali yang mempunyai cukup kepandaian dan berguna bagi masyarakat Bali (Statuten Perkoempoelan Bali Darma Laksana, Fats 2. Toejoen Perhimpoean dalam *Djatajoe* No. 1, Agustus 1936).

Perkumpulan Bali Darma Laksana dijadikan sebagai wadah untuk menghimpun kaum pemuda nasionalis di Bali untuk bersatu memajukan (modernisasi) masyarakat dan kebudayaan Bali sesuai

dengan perkembangan zaman. (*Djatjoe*, No. 8, Thn. III, 25 Maret 1939). Karena organisasi ini tidak bersifat politik maka pemerintah kolonial Belanda mengizinkan organisasi ini berkembang, sehingga mendapatkan dukungan dari pegawai pamong praja, dan pemuda pelajar di seluruh Bali (Pendit, 1978:1-2). Untuk memajukan masyarakat Bali, organisasi BDL menyusun program kerja di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan melalui gerakan penyuluhan ke desa-desa. Penyuluhan di bidang sosial, antara lain bertujuan untuk menanamkan kesadaran agar masyarakat Bali tidak membiarkan wanita di desa-desa bertelanjang dada yang akan dapat merendahkan derajat serta kepribadian masyarakat Bali. Para wanita yang bertelanjang dada sering dijadikan sasaran pemotretan oleh wisatawan asing yang berkunjung ke Bali, sebagai akibat dari dibukanya ruang Bali sebagai destinasi pariwisata oleh pemerintah kolonial Belanda (*Djatjoe*, No. 1, Thn IV, 25 Agustus 1937).

Berikut ini akan dibagikan secara singkat hubungan antara jenis, produk, kuasa dan relasi serta praktik diskursif yang ada di dalam wacana ataupun di balik wacana *Baliseering*:

Jenis Wacana	Produk Wacana	Power Knowledge		Relasi		Praktik Diskursif
		<i>Savoir</i>	<i>Connaisance</i>	Dalam Wacana	Di Balik Wacana	
(1) Kolonial (politik etis)	<i>Baliseering</i> (Balinisasi)	Konservasi terhadap konservatisme tradisi dan Budaya masyarakat Bali.	<i>Living Museum</i>	(1) Perubahan politik dari cara peperangan ke politik diplomasi kebudayaan; (2) membendung usaha untuk melindungi Bali dari penyebaran agama Kristen oleh kaum misionaris Katolik dan Protestan dan radikalisme Islam dari Jawa; (3) menunjukkan pada dunia internasional bahwa ada segi-segi humanism di balik kejayaan penjajah kolonial dengan mewujudkan keamanan, ketertiban, kemakmuran rakyat ( <i>rust en order</i> ) melalui kebijakan politik etis.	(1) Konservatisme tradisi budaya lokal untuk membendung pengaruh modernisasi (2) Strategi untuk membendung pergerakan nasionalisme Jawa. (3) Konstruksi ruang Bali untuk dijadikan destinasi wisata internasional. Dilakukan dengan menjadikan konservatisme, keunikan tradisi budaya dan kesenian, serta daya tarik erotisme tubuh wanita Bali dituangkan ke dalam lukisan kanfas dan foto-foto, serta daya tarik lanskap tradisi kehidupan masyarakat dan keindahan alam pedesaan Bali dijadikan komoditas wisata.	(1) 1928 pendirian yayasan <i>Kirya Lief-rinck-Van Der Tuk</i> perlawanan Lontar Bali dan tahun 1932 Belanda mendirikan Museum Bali untuk konservasi tinggalan arkeologi. (2) Pengiriman diplomasi kebudayaan ke Batavia tahun 1929 dan tahun 1931 ke <i>Paris Colonial Exposition</i> . (3) Pembukaan ruang Bali untuk pariwisata sejarah dan budaya ( <i>historical cultural land-shape/HCL</i> )

(2) Anti Wacana Kolonial	Modernisasi pendidikan	Paham nasionalisme	Majalah <i>Djata-joe</i> ;	(1)Memajukan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. (2) Mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah kolonial Belanda di dalam bidang pendidikan.	(1)Perubahan <i>mind-set</i> berpikir masyarakat Bali untuk menerima kemajuan dari Barat dan menolak konservatisme yang dididungkan Belanda. (2)Manumbuhkan dan memupuk paham nasionalisme kebangsaan yang dibawa oleh para pemuda Bali setelah menamatkan pendidikan dari Jawa.	Organisasi pendidikan, sosial, dan budaya disebut Bali Darma Laksana (BDL).
--------------------------	------------------------	--------------------	----------------------------	---	---	---

(Sumber: Diolah Dari Hasil Penelitian, 2016).

### Institusi Penopang *Baliseering* sebagai Wacana Kolonial

Wacana *Baliseering* menjadi wacana yang dominan pada tahun 1930-an, karena didukung oleh kekuasaan. Wacana *Baliseering* diterima pada tahun 1930-an, secara implisit menentukan dengan cara apa dan atas argumentasi atau rasionalitas apa wacana tersebut dibangun. Kekuasaan dilaksanakan agar suatu wacana terwujud. Menurut Foucault kehadiran institusi sangat penting agar berfungsi *power* negara modern (Lubis 2014:80). Negara modern yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemerintahan kolonial Belanda yang berhasil menciptakan ketertiban dan keamanan (*rust en order*) daerah jajahan dalam tatanan ketatanegaraan *Pax Nederlandica*.

Dengan mengacu pada konsep Gramsci tentang pelaksanaan politik dalam upaya penguasaan intelektual dan moral, salah satu cara dari penjajahan Belanda untuk menguasai masyarakat pribumi adalah politik penguasaan secara tidak langsung (*indirect rule*) dengan memanfaatkan institusi yang sudah ada dalam masyarakat, yaitu birokrasi tradisional dari sistem pemerintahan raja-raja setempat untuk melestarikan kekuasaan pemerintah kolonial. Hal ini dilakukan karena pemerintahan kolonial Belanda kekurangan staf administrasi untuk menguasai wilayah jajahan yang begitu luas. Manfaat lain dari sistem pemerintahan *indirect rule* ini, sebagai sistem penguasaan secara tidak langsung (*indirect rule hegemony*) pada aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, tidak akan menimbulkan konflik (resistensi) dari masyarakat yang sudah terbiasa diperintah oleh raja-raja lokal yang sangat dihormati dalam

sebuah ikatana hubungan patron-klien. Sistem pemerintahan *indirect rule* adalah sebuah *konsensus* antara pemerintah kolonial Belanda dengan raja-raja lokal, sebagai pihak yang telah ditaklukkan dengan tetap membiarkan mereka untuk memerintah dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip kebiasaan moral, religi, hubungan sosial tradisional, dan konservatisme tradisi dan budaya. *Indirect rule hegemony* adalah proses hegemoni yang berlangsung secara halus, karena menysar pada kesadaran-kesadaran yang menentukan pikiran-pikiran, perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan masyarakat (Robert Bocoock, 1986:33). *Indirect rule hegemony* bukan hubungan yang didominasi dengan menggunakan kekuasaan semata, melainkan hubungan persetujuan (*consensus*) dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis dari elite tradisional (raja-raja lokal). *Indirect rule hegemony* tidak hanya diterapkan dalam sistem politik, tetapi juga dalam bidang tradisi dan budaya yang memunculkan wacana *Baliseering* sebagai wacana kolonial untuk membentuk struktur kognitif masyarakat.

Secara politik, setelah suasana keamanan dan ketertiban di Bali terwujud, Bali dan Lombok dimasukkan ke dalam Keresidenan Bali-Lombok, yang meliputi *Afdeeling* Lombok yang berkedudukan di Kota Mataram, *Afdeeling* Bali Utara di Singaraja dan *Afdeeling* Bali Selatan di Denpasar. *Afdeeling* Bali Utara terdiri dari dua *Onderafdeeling*, yaitu Buleleng dan Jembrana yang langsung berada di bawah pengawasan seorang *Residen*; sedangkan *Afdeeling* Bali Selatan terdiri dari *Onderafdeeling*, yakni Badung, Tabanan, Gianyar, Karangasem, Klungkung (Nusa Penida) dan Bangli. Setiap *Onderafdeeling* dibagi lagi menjadi beberapa distrik yang masing-masing dipimpin oleh seorang Punggawa. Distrik dibagi lagi menjadi beberapa desa yang dikepalai oleh seorang perbekel, dan desa dibagi menjadi sejumlah *banjar* yang dikepalai oleh seorang klian (H.J.E. Moll, 1941:51).

Selanjutnya mulai tanggal 1 Juli 1938 diberlakukan sistem pemerintahan *zelfbestuur*. (otonomi). Daerah Bali dibagi menjadi delapan *landschape*, yaitu Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem. Pada setiap *landschape* diangkat seorang kepala daerah yang disebut *zelfbestuurder* dengan diberikan gelar-gelar kebangsawanan. *Zelfbestuurder* Bangli, Gianyar dan Jembrana diberikan gelar Anak Agung; Tabanan dan Badung diberikan gelar Cokorde; Klungkung diberi gelar Dewa

Agung; sedangkan Karangasem diberikan gelar Anak Agung Agung. Kedelapan kepala daerah (*zelfbestuurder*) Bali dilantik di Pura Besakih pada tanggal 29 Juli 1938 (Panetja, 1986: 38; *Djatajoe*. No. 2. 25 Djoeli 1938 Thn ke-2: 353-357). Pada setiap *landscape* (swapraja) dibentuk Lembaga Penasihat (*Paruman Negara*) untuk membahas berbagai kepentingan dan persoalan daerah. Gabungan delapan *swapraja* membentuk *Paruman Agung* yang bertugas untuk menangani kepentingan di semua daerah *swapraja* di Bali. *Paruman Agung* di bawah pimpinan *Residen* dan terdiri atas para anggota yang berhak memberikan suara (para penguasa *swapraja*) dan dua orang anggota penasehat sebagai utusan setiap daerah (H.J.E. Moll, 1941:19).

### **Kaum Orientalis Pendukung *Baliseering***

Wacana kolonial *Baliseering* adalah salah satu wacana pemerintah kolonial Belanda untuk mewujudkan kuasa pengetahuan tentang tradisi dan budaya masyarakat. Dilihat dari konsep *bio-power* Foucault (dalam Lubis, 2014:86), kuasa atas ilmu pengetahuan tradisional Bali dalam wacana *Baliseering*, sebagai suatu bentuk keinginan untuk berkuasa atas kesadaran kognitif orang Bali. Kuasa ini bertujuan untuk mempertahankan *status quo* (konservatisme) tradisi dan budaya menjadi hegemoni. Di lain pihak, pemerintah kolonial Belanda juga menghapuskan tradisi budaya yang dianggap melanggar hak-hak azasi manusia, seperti menghapuskan adat bunuh diri yang dilakukan oleh janda para raja dalam bentuk tradisi *mesatya* dengan cara menceburkan diri ke kobaran api ketika dilakukan kremasi terhadap jenazah raja; menghapuskan kelaliman (*despotic*) para pangeran yang memperbudak dan memeras rakyatnya, menghukum atau membunuh dengan kejam terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran karena tidak hormat atau tidak patuh terhadap tuannya (Covarrubias, 2013: 454).

Konservatisme budaya ini dijadikan sebagai daya tarik bagi pelancong dari luar negeri mengunjungi Bali. Dalam usaha penggalian dan penemuan terhadap keagungan (kemuliaan) tradisi dan budaya Bali, pemerintah kolonial Belanda telah mengangkat para sarjana lulusan dari Belanda yang telah meneliti tentang aspek hukum adat, sosial, budaya sebagai pegawai administrasi pemerintahan kolonial di Bali, seperti Dr. Victor Emanuel Korn. Ia memperoleh gelar doktor dengan desertasinya berjudul *Het*



*Adatrecht van Bali (Balinese Adat Law)*, diterbitkan oleh penerbit *the Hague* tahun 1924. Karya lainnya adalah *Dorpsrepubliek Tenganan Pagringsingan (The Village Republic of Tenganan Pegringsingan)*, diterbitkan oleh penerbit *Santpoort* tahun 1933). Dr. Roelof Goris desertasinya berjudul "*Bijdrage tot de Kennis der Oud Javaansche Theologie (Contribution to the Knowledge of Early Javanese and Balinese Theology)*", diterbitkan di Leiden tahun 1926. Pengetahuannya yang sangat mendalam tentang tradisi dan masyarakat Bali dipublikasikan dalam karyanya berjudul, "*The Balinese Medical Literature, Djawa, XVII (1937); Bali: Atlas Kebudajaan/Cult and Customs/Cultuurgescheidenis in Beeld* diterbitkan di Jakarta, 1955 (Wertheim (ed.).1960: vii-ix).

Demi kepentingan pariwisata, maka pemerintah kolonial Belanda juga memanfaatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, seniman, dan fotografer yang pernah mengunjungi Bali. Berdasarkan kajian itu, pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan promosi Bali sebagai Taman Firdaus dari Timur, *The Last Paradise, the Island of Thousand Temple*, sehingga menarik peneliti asing, seperti Claire Holt berhasil menulis buku *Art in Indonesia*; Margaret Mead dan Gregory Beteson menulis buku *Balinese Character*; Beryl deZoete dan Walter Spies menulis buku *Dance and Drama in Bali*; Jane Belo menulis buku *Trance in Bali* dan *Traditional Balinese Culture*; Mantle Hood menulis artikel *Enduring Tradition: Music and Theatre of Java and Bali*.

Collin McPhee melakukan dokumentasi tentang kehidupan di pedesaan dalam sebuah film dokumenter yaitu *A House in Bali* dan *Music in Bali*, yang sampai sekarang dijadikan refrensi oleh penulis orientalis tentang Bali. Selain itu, Collin McPhee juga berhasil menciptakan komposisi untuk orkestra Barat dengan judul *Tabuh-Tabuhan*. Komposisi *tabuh-tabuhan* yang terdiri dari *overture, nocturne*, dan *epilog* merupakan ciptaan musik yang disusun berdasarkan esensi 15 gamelan Bali, seperti *gambelan gong gede, luang, semarpegulingan, pelegongan, gambuh, slonding, gender wayang* dan lain-lain. Metode penciptaan yang digunakan oleh Collin McPhee adalah metode *recreating* (mencipta ulang) dengan mengadaptasikan *gamebelan* Bali ke dalam orkestra Barat yang berisikan instrument-instrumen piano, violin, viola, cello, cymbal, drum, dan instrument perkusi lainnya (Bandem, dkk: 2015: 8-9).

Ini berarti proses globalisasi kesenian Bali telah memasuki

tahap hibridisasi dengan mengawinkan unsur-unsur musik lokal Bali dengan unsur-unsur musik modern Barat menghasilkan jenis *music glocal*. Tabuh-tabuhan yang diciptakan oleh Collin McPhee menjadi salah satu model penciptaan musik kontemporer Barat abad ke-20 dan ke-21. Selain kesenian gambelan, juga pelukis asing ikut berperan untuk memperkenalkan Bali ke luar negeri, seperti Walter Spies seorang pelukis Jerman mengunjungi Bali tahun 1925, kemudian pada tahun 1927 datang lagi ke Bali dan menetap tinggal di Puri Ubud. Setelah itu semakin banyak berdatangan tokoh-tokoh peneliti dan seniman asing ke Bali dan rata-rata mereka jatuh cinta untuk menetap di Ubud, seperti: Han Snel, Claire Holt, Antonio Blanco, Rudolf Bonnet, Miguel Covarrubias, Rolf de Mare, Katherine Mershon dengan menggunakan *taksu Bali (Bali's spell of power)* sebagai sumber inspiratif mereka (Bandem, dkk: 2015: 8-9).

### **Elite Tradisional Pendukung *Baliseering***

Elite tradisional (kaum bangsawan) mendapatkan *previllage* (hak-hak istimewa) dalam sistem pemerintahan secara tidak langsung (*indirect rule*) yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dari segi pendidikan anak-anak kaum bangsawan (kaluarga raja-raja) mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah Belanda dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Anak-anak kaum bangsawan muncul menjadi pendukung semua kebijakan dan wacana kolonial, yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda dalam usahanya untuk melanggengkan kekuasaannya di Bali. Elite tradisional menjadi perpanjangan tangan dari birokrasi kolonial dijadikan sebagai alat untuk melakukan hegemoni (kuasa) atas politik, hukum, sosial, budaya dan tradisi.

Terdapat tokoh-tokoh elite tradisional yang berasal dari keturunan Raja Ubud yang dijadikan sebagai alat perpanjangan birokrasi pemerintahan kolonial Belanda di Bali, dalam usahanya untuk mewujudkan praktik diskursif dari wacana *Baliseering*. Salah satunya adalah Tjokorde Gde Raka Sukawati. Tjokorde Gde Raka Sukawati lahir tanggal 15 Januari 1899. Setelah tamat sekolah OSVIA ia diangkat menjadi *Punggawa* (Camat) Ubud tahun 1919-1927. Tahun 1924, ia dipilih menjadi wakil Bali dalam keanggotaan *Volksraad* (Parlemen Hindia Belanda). Ia kemudian diangkat menjadi anggota *College Van Gedelegeerden* (Dewan Rakyat) (Nooteboom [et al] 1948: 45; *Penjoeloeh Bali*, Djoem`at 10 Djanuari 1947, Tahoen ke I

No. 59: hal I kolom 3-6).

Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai seorang birokrat, politikus, diplomat, dan impresario seni. Multitalenta yang dimilikinya ini, tidak hanya karena ia keturunan dari Raja Ubud, tetapi juga karena semangatnya untuk menimba ilmu pengetahuan Barat yang menyebabkan ia menguasai ilmu politik dan diplomasi. Ketika menjadi wakil Bali untuk duduk dalam *Volksraad* di Batavia, ia melakukan penentangan dengan keras terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh Dr. Kraemer, seorang pekar Injil Protestan yang pernah menulis tentang “kegagalan dan kedangkalan agama Bali, sehingga orang Bali sebenarnya ingin menjadi Kristen”. Ia melakukan pembelaan terhadap agama Bali dengan mengatakan pendapat Dr. Kraemer sebagai pendapat yang penuh dengan prasangka dan mengaduk-aduk permusuhan dan konflik kasta bawah dengan kasta yang lebih tinggi (Covarrubias, 2013:448). Karier politik tertinggi yang ia capai pernah menduduki jabatan sebagai Presiden Negara Indonesia Timur (NIT) yang berkedudukan di Makasar tahun 1946-1950 (Sendra, 1989).

Strategi *Baliseering* untuk memperkenalkan eksotisme Bali dilakukan melalui diplomasi kebudayaan ke luar negeri, untuk mempromosikan Bali lewat pameran dan pementasan kesenian di atas panggung (*fronstage authenticity*) di *Paris Colonial Exposition* pada tahun 1931. Autentisitas panggung adalah ruang-ruang kesenian dan pertunjukan yang sudah dimanipulasi dan dirancang sesuai dengan permintaan wisatawan (*touristic entertainment*) (MacCannel, 1999; Heitmeann, 2011). Usaha untuk mengangkat kearifan lokal budaya Bali dalam pentas panggung dunia, dilakukan oleh Tjokorde Gde Raka Sukawati dengan misi kesenian yang beranggotakan 51 seniman yang terdiri dari maestro-maestro tari dan gambelan Bali dari Ubud, dan Peliatan, seperti Anak Agung Gde Mandra, I Ketut Rindha, Tjokorde Oka Tublen, Tjokorde Gde Rai Sayan, Dewa Gde Raka, Tjokorde Anom, Jero Tjandra, dan Ni Rimpeg. Selain para maestro seni tari dan gambelan, Tjokorde Gde Raka Sukawati juga menyertakan beberapa seniman lukis dan patung, serta para pengrajin yang ikut memamerkan keahlian dan karya-karya mereka di Anjungan Hindia Belanda. Misi kesenian Bali juga menampilkan dramatari Calon Arang dan Legong Keraton.

Anjungan Hindia Belanda di *Paris Colonial Exposition* dirancang oleh Tjokorde Gde Raka Sukawati menampilkan kombinasi unik

antara arsitektur Barat dan arsitektur Bali (oriental arsitektur), dengan ciri khas bangunan *meru* menjadi ikonnya. Gerbang utama sebagai pintu masuk anjungan juga menampilkan arsitek pintu gerbang Puri dari kerajaan-kerajaan di Bali. Anjungan Hindia Belanda ini dibangun di Bois de Vincennes di Paris Timur menjadi ruang untuk pementasan dan pameran misi kesenian yang berlangsung dari tanggal 6 Mei sampai dengan 9 November 1931. Kompleks anjungan juga dipenuhi dengan berbagai bangunan yang mencerminkan nuansa arsitektur pulau-pulau lain di Hindia Belanda. Tjokorde Gde Raka Sukawati juga memberikan petunjuk kepada para insinyur perancang anjungan, agar membangun sebuah *kalangan* (arena pementasan), yang berbentuk *Bale Pegambuhan* sesuai dengan kebutuhan dramatari Bali klasik. Bangun *Pegambuhan* ini meniru lanskap Puri Ubud yang menjadi representasi kekhasan bangunan-bangunan kerajaan Bali pada tahun 1930-an. Dekorasi arena itu dihiasi dengan berbagai huruf (*patra*) ukiran Bali dengan menampilkan berbagai tingkat kerumitan hiasan (Bandem, dkk: 2015: 6-9).



Foto 1. Anjungan pemerintah kolonial Belanda dalam Paris Colonial Exposition, mengambil bentuk bangunan arsitektur Bali berupa meru (Foto Koleksi Puri Ubud/ Repro Darma Putra)

Kombinasi ornamen panggung dan persembahan tarian *Calon Arang* semakin menarik perhatian dan kekaguman mereka terhadap pertunjukkan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh Antonin Artraud seorang tokoh seni *teatre* yang sengaja datang sebagai wisatawan untuk menyaksikan pertunjukkan tersebut. Pertunjukkan drama tari Calon Arang mampu menggugah imajinasi penonton, sehingga menimbulkan perasaan kagum dan euforia kegembiraan (*exited*) (Hubert dan Mauss dalam Sharon Bohn Gmelch 2004:27). Pertunjukkan tarian Calon Arang telah memberikan kesan dan kenangan yang mendalam dalam sanubari pengunjung (*tourist gaze*) (John Urry, 2011).

### **Artikulasi *Baliseering* untuk Pembukaan Ruang Wisata Sejarah dan Budaya Bali Versi Kolonial**

Paradigma kepariwisataan budaya secara ontologis, epistemologis dan aksiologis sudah dikonstruksi oleh pemerintah kolonial Belanda melalui wacana *Baliseering*. Untuk tujuan ini, pemerintah kolonial Belanda telah merekrut sarjana tamatan Belanda untuk melakukan kajian secara ontologi dan epistemologi dari wacana *Baliseering*. Para sarjana ini ditugaskan untuk melakukan penelitian terhadap aspek-aspek tradisi, budaya, agama, hukum adat dan sejarah Bali. Diantara sarjana tersebut, seperti Victor Emanuel Korn seorang ahli hukum meneliti tentang “Hukum Adat Bali” (*Het Adatrecht van Bali*); *The Village Republic of Tenganan Pegringsingan* (*Dorpsrepubliek Tnganan Pagringsingan*). Rudolf Goris seorang ahli arkeologi meneliti tentang teologi masyarakat Jawa dan Bali dalam penelitiannya berjudul *Bijdrage tot de kennis der Oud-Javaansche en Balineesche theology* (*Contribution to the Knowledge of Early Javanese and Balinese Theology*); *The Balinese Medical Literature*; *Cultuurgescheidenis in beeld* (*Cult and Customs*). Jan Lodewijk Swellengrebel seorang ahli linguistik ditugaskan sebagai misionaris untuk meneliti bahasa Bali untuk kepentingan penyebaran agama Kristen. Beberapa hasil penelitiannya antara lain: *Kerk and Temple op Bali* (*Church and Temple in Bali*); menerjemahkan kitab *Gospel of Luke* ke dalam bahasa Bali menjadi *Orta Rahayu Manut Pangerencanan Dane Lukas*; *Bible Translation and Politeness on Bali*.

Secara aksiologis, wacana *Baliseering* bertujuan untuk menghidupkan kembali konservatisme serta keunikan tradisi, budaya, dan sejarah Bali untuk kepentingan praktek kepariwisataan



budaya. Artinya pemerintah kolonial Belanda telah merekonstruksi ruang Bali dijadikan sebagai ruang wisata sejarah dan budaya (*historical, cultural landscape/HCL*). Untuk membuka ruang HCL ini, maka kapital budaya (*cultural capital*) berupa keunikan, keagungan dan kemuliaan masa lalu Bali dijadikan sebagai media promosi oleh Belanda. Promosi ini dilakukan melalui lukisan kanfas dan foto-foto wanita Bali yang bertelanjang dada, serta tulisan-tulisan yang dibuat oleh para peneliti, wartawan dan fotografer tentang tinggalan-tinggalan arkeologis (candi-candi serta pura-pura kuno di Bali). Belanda memperkenalkan Bali kepada para turis mancanegara dengan menggunakan ikon “*the island of thousand temples*” dan “*the Last Paradise*”. Berkat promosi yang dilakukan oleh Belanda, maka Bali semakin diminati untuk dikunjungi oleh turis di Eropa dan Amerika. Wisatawan mancanegara mulai berdatangan untuk melihat langsung keunikan tradisi budaya, eksotisme alam pedesaan Bali, candi (pura) peninggalan arkeologis zaman Bali Kuno.

Pada tahun 1908 maskapai pelayaran kerajaan KPM (*Koninklijke Plaketaart Maatchappij*) yang diberikan hak monopoli jalur pelayaran antarpulau di Hindia Belanda mendirikan Asosiasi Pariwisata Hindia Belanda (*Vereeniging Toeristenverkeer in Nederlandsch Indie*). Organisasi ini membuka Biro Pariwisata (*Official Tourist Bureau*) yang berpusat di Jawa, bertugas untuk merintis kerjasama dengan biro perjalanan yang ada di Batavia (Jakarta) dan luar negeri. *Official Tourist Bureau* bertugas untuk mempromosikan Bali sebagai “Mutiar Kepulauan Nusa Tenggara”. Perwakilan KPM di Singaraja kemudian diangkat sebagai wakil resmi dari *Official Tourist Bureau*, yang menyediakan transportasi penyewaan *taxi* lengkap dengan supir dan *guide* berbahasa Inggris. Pada tahun 1928, KPM membuka Bali Hotel di Denpasar. Pada tahun 1924 aksesibilitas wisatawan semakin lancar setelah dibukanya pelayaran mingguan antara Singapura, Batavia, Semarang dan Surabaya ke pelabuhan Buleleng di Singaraja dan ke Makassar. Para wisatawan dari Amerika Utara dan Eropa tiba di Bali setelah menyeberang Samudra Pasifik atau menyusuri pantai Asia. Setelah mendarat di pelabuhan Buleleng para wisatawan menyewa mobil dan pemandu wisata menuju Denpasar melalui Tabanan dan menginap di Bali hotel (Pichard, 2006:32-33).

Para turis mengikuti paket wisata perjalanan selama tiga hari.



Paket ini dimulai dari hari Jumat setelah kapal yang ditumpangi wisatawan mendarat di pelabuhan Buleleng. Para turis setelah menyewa mobil dan pemandu wisata berangkat menyusuri jalan pantai menuju Bubunan di barat Kota Singaraja. Mereka lalu membelok ke pesanggrahan Munduk. Dari sini dengan menaiki kuda, mereka dapat melanjutkan perjalanan ke daerah sekitarnya, seperti ke danau Tamblingan dan Buyan. Pada sore hari, mereka melanjutkan perjalanan ke Denpasar melalui Tabanan dan menginap di Bali Hotel. Setelah makan malam, para turis disajikan acara kesenian tarian Bali. Pada hari Sabtu, para turis dapat memilih *opsional tour* berkunjung ke Museum Bali atau menonton pertunjukkan tarian dekat hotel. Setelah itu, para turis melanjutkan perjalanan menuju Desa Bedulu untuk melihat Goa Gajah. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Tampak Siring terlebih dahulu mereka singgah di Pura Penataran Sasih di Pejeng untuk melihat peninggalan nekara perunggu "Bulan Pejeng". Perjalanan dilanjutkan menuju ke Gunung Kawi (Tampak Siring) dan makan siang di Pesanggrahan Tirta Empul. Setelah itu, para turis diajak menuju Klungkung untuk melihat tempat pengadilan Kerajaan Klungkung Bangunan Kerta Gosa, lalu ke Kusamba untuk melihat Gowa Lawah, terakhir mereka balik ke Denpasar. Pada hari Minggu pagi, para turis diantar ke Bangli untuk melihat Pura Kehen, kemudian menuju Kintamani untuk melihat pemandangan alam kaldera Gunung Batur. Setelah makan siang di Pesanggrahan Kintamani, mereka kembali ke Singaraja dengan terlebih dahulu mengunjungi objek wisata, seperti Pura Desa di Kubutambahan dan Sangsit. Pada Minggu sore harinya, mereka kembali naik kapal di pelabuhan Buleleng menuju ke Batavia atau Makassar (Picard, 2006:33-34).

Lansekap alam pedesaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di Bali era kolonial ditelusuri melalui dokumen yang dibuat oleh para peneliti, seperti Nieuwenkamp dan George Krause (1920). Nieuwenkamp seorang pelukis Belanda yang menerbitkan buku-buku berilustrasi gambar-gambar tentang rutinitas masyarakat Bali serta tradisi keseniannya. George Krause seorang dokter Jerman yang bekerja untuk pemerintahan kolonial Belanda. Ia menerbitkan sebuah buku yang berisi kurang lebih 400 foto-foto, menampilkan keindahan bentuk tubuh perempuan Bali dengan kecantikan fisiologis alami, seperti diungkapkan dalam tulisannya

“Balinese women are beautiful as beautiful as one can imagine, with a physiologically simple and dignified beauty, full of Eastern nobility and natural chastity” (perempuan Bali sangat cantik, secantik yang dapat kita bayangkan; kecantikan itu anggun dan sederhana secara fisiologis, penuh kemuliaan dari Timur dan kesucian alami) (Picard, 2006:40). Lalu seorang antropolog Amerika yang bernama Coolin McPhee dalam bukunya yang berjudul *A House in Bali* (1930).

Fakta di atas merupakan operasi wacana kolonial yang dimanifestasikan sebagai *Baliseering*. Makna dari praktik *Baliseering* hakekatnya merupakan taktik *divide et impera* guna meredam paham dan spirit nasionalisme yang tumbuh pada tahun 1928 (dikenal sebagai Sumpah Pemuda) sehingga memunculkan semangat eksklusivisme kedaerahan Bali. Dikonstruksi bahwa Bali memiliki budaya adiluhung yang berbeda dengan daerah lainnya, terutama Jawa. Pada titik ini, dapat dikatakan *Baliseering* merupakan antitesis dari gerakan nasionalisme. Artinya, *Baliseering* merupakan spirit antinasionalisme berbungkus etnosentrisme rekaan kolonial.

### **Komodifikasi Simbol-simbol Agama Hindu sebagai Atraksi Kepariwisata Budaya**

Istilah komodifikasi menurut Piliang (2004:21) adalah proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan komoditas menjadi komoditi. Secara evolusi, Greenwood (dalam Pitana, 2005:172) menyebutkan bahwa hubungan antara wisatawan dengan masyarakat lokal menyebabkan terjadinya proses komoditisasi dari unsur-unsur kebudayaan, seperti kesenian, sistem kepercayaan, sehingga memunculkan istilah komoditisasi budaya (*cultural commoditization*). Komodifikasi simbol-simbol tarian sakral agama Hindu Bali, seperti tarian Calon Arang yang diangkat menjadi *fronstage authenticity* (otentisitas panggung) kedalam dramatari Calon Arang dipertunjukkan dalam Anjungan Hindia Belanda di Paris *Colonial Exposition* tahun 1931. Tarian ini adalah tarian sakral (*sacred*) yang hanya dipertunjukkan ketika ada upacara *piodalan* di Pura Dalem Kahyangan (Dalem Setra). Tarian ini mengisahkan pertempuran antara kekuatan penganut paham kebajikan (kebenaran) yang beraliran ilmu putih (*whitemagic*), dengan tokoh utama adalah Mpu Beradah melawan tokoh nenek sihir yang menganut paham kejahatan penganut ilmu hitam (*blackmagic*)

dengan tokoh utamanya Rangda Nateng Girah. Kekuatan sakti yang mereka miliki direpresentasikan dengan menggunakan artefak-artefak sakral, yaitu pemakaian topeng magis, seperti *Barong Ket*, *Rangda*, *Celuluk*, *Bojog* dan lain-lain. Barong Ket adalah representasi kekuatan ilmu putih pada klimaks tarian berhasil memenangkan pertempuran melawan Rangda sebagai representasi kekuatan ilmu hitam, sehingga wabah penyakit yang melanda Kerajaan Daha bisa diatasi (Suastika, 1997:248-284).



Foto 2. Tari Barong yang menjadi bagian dari pentas Calon Arang. Barong sebagai lambang kekuatan baik (Foto Darma Putra)

Adapun komodifikasi terhadap tarian sakral Calon Arang dilakukan oleh Tjokorde Gde Raka Sukawati, seorang impresario seni tari terhadap beberapa unsur tarian dilihat dari: (a) durasi waktu pada alur (plot) cerita yang biasanya tarian ini ditarikan ketika ada upacara di Pura Dalem Setra berdurasi tiga jam menjadi berdurasi satu jam; (b) pergeseran dari nilai-nilai sakral (*sacred*) menuju nilai-nilai yang bersifat *profane* (duniawi), yaitu tarian ini yang aslinya (*backstage authenticity*) hanya dipersembahkan

dan dipertunjukkan untuk upacara khusus pada saat odalan di Pura Dalem Setra (kuburan), dipersembahkan di atas panggung (*frontstage authenticity*) yang ditonton oleh wisatawan pengunjung pameran di arena Anjungan Hindia Belanda di Paris *Colonial Exposition*. Ini berarti tarian Calon Arang telah mengalami proses komersialisai (kapitalisasi) budaya di mana objek, kualitas dan simbol-simbol budaya dijadikan sebagai produk (komoditi) untuk dijual di pasaran. (c) pengurangan tokoh-tokoh dalam tarian hanya menampilkan tokoh-tokoh utama, seperti Prabu Erlangga, Rangda Nateng Girah, Ratna Manggali, Mpu Beradah dan Mpu Bahula; (d) hilangnya unsur-unsur *trance* yang biasanya dialami oleh penari Barong dan Rangda apabila tarian ini ditarikan pada upacara di Pura Dalem kayangan Setra.; (e) pergeseran fungsi dan makna tarian yang ada pada unsur-unsur *folklore* (cerita rakyat) tentang Calon Arang. Tarian Calon Arang berfungsi sebagai *tari bebali* (*ceremonial dance*) sebagai pengiring (pelengkap) pujawali (puja persembahan) kepada Dewi Durga pada saat upacara piodalan di Pura Dalem Kahyangan (Dalem Setra). Tari *bebali* biasanya dipergelarkan di halaman tengah pura (*jaba tengah*) yang memiliki unsur naratif.

## Penutup

Wacana *Baliseering* dikonstruksi oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1930 untuk memulihkan kesan kebrutalan tentara Belanda yang melakukan pembunuhan secara *genocide* dalam perang Puputan Badung 1906 dan Puputan Klungkung tahun 1908. Wacana kolonial ini sebagai kebijakan politik pragmatis bermuka dua, di satu sisi untuk pemulihan pencitraan dengan mengubah taktik penjajahan dari penaklukan dan perang ke taktik diplomasi budaya. Di sisi lain, wacana ini bertujuan untuk meredam paham nasionalisme Jawa yang dibawa oleh pelajar Bali yang mendapatkan pendidikan di Jawa. Relasi-relasi yang ada di balik wacana kolonial dilihat dari konsep *bio-power* dan *power knowledge* (kuasa wacana), diterapkan oleh Belanda melalui institusi pendidikan kolonial. *Bio-power* sebagai suatu bentuk kekuasaan pemerintah kolonial bertujuan untuk membentuk dan mengkonstruksi kesadaran kaum muda Bali terhadap pengetahuan kekayaan warisan budaya masa lalunya, sehingga tertanam dalam kesadaran praktisnya untuk mempertahankan konservatisme kehidupan tradisional mereka

dalam tatanan suasana perdamaian dan ketertiban (*rust en orde*) hukum kolonial penjajahan Belanda.

Adapun wacana *Baliseering* sebagai wacana kolonial dibangun oleh pemerintah Belanda berdasarkan argumentasi bahwa, Bali sebagai museum hidup (*living museum*), penerus dari warisan budaya Hindhu Majapahit, perlu dikonservasi dari proses Kristenisasi, Islamisasi, dan pengaruh modernisasi pemikiran Barat. Wacana *Baliseering* didukung oleh aparat pemerintah kolonial Belanda dan kaum Orientalis, sedangkan mereka yang anti wacana kolonial (kaum nasionalis) berpendapat bahwa wacana *Baliseering* merupakan instrument pembodohan yang dikonstruksi oleh paham kolonialisme. Mereka yang anti wacana kolonial dilakukan oleh kaum pemuda yang telah menyelesaikan pendidikan di Jawa yang membawa paham nasionalisme kebangsaan. Di lain pihak, dikalangan kaum Orientalis juga terjadi perbedaan pendapat, sebagai akibat dari dibukanya ruang Bali sebagai tujuan wisata. Mereka berpendapat bahwa menjadikan keunikan, eksotisme dan konservatisme tradisi dan budaya Bali sebagai komoditas wisata akan dapat merusak keunikan tradisi budaya masyarakat Bali.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi wacana kolonial dan anti wacana kolonial, masing-masing memiliki strategi untuk memenangkan kontestasi tersebut. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda antara lain: (a) mendirikan Yayasan Ketrja Liefrink Van Der Tuk dan Musium Bali; (b) melakukan pengiriman delegasi kesenian Bali dalam *Paris Kolonial Exposition* dan (c) pembukaan ruang Bali untuk pariwisata budaya. Sebaliknya mereka yang anti wacana kolonial mendirikan organisasi yang bergerak dibidang pendidikan, sosial dan budaya (*soft strategy*). Pilihan *soft strategy* ini didasarkan pada alasan bahwa perlawanan secara terbuka akan segera direpresi dan dibrangus oleh pemerintah kolonial. Dalam bingkai pemikiran Gramsci, pemerintah kolonial secara efektif memaksimalkan *repressive state apparatus* (RSA), yakni menggunakan instrument kekerasan legitimatif, sehingga dapat dikatakan dalam kontestasi ini kaum nasionalis dengan perspektif *anti Baliseering* menjadi wacana kecil (*small narrative*) terlibas oleh kuasa wacana kolonial, yakni *Baliseering* sebagai wacana besar (*grand narrative*).



## Daftar Pustaka

- Bandem (et.al.).2015. *Penghargaan Parama Bakti Pariwisata*. Gianyar: Pemda Gianyar.
- Bocock, Robert. 1986. *Hegemony*. Chichester: Ellis Horword Limited.
- Brouweker, *Memorie van Overgave van den Resident van Bali en Lombok, Oktober, 1932*.
- Covarrubias, Miguel. 2013. *Pulau Bali: Temuan yang Menakjubkan*. Denpasar:Udayana University Press.
- Djatajoe*, No. 1, 25 Agustus, Thn II Soerabaia: Modern Cannalaan, 1937, hal. 1-2.
- Djatajoe*, No.12, 25 Djuli, Thn III . Soerabaia: Modern Cannalaan, 1939, hal. 389-390.
- Djatajoe*, No. 1, Agustus, Thn I. Soerabaia: Modern Cannalaan, 1936, hal. 4-8.
- Djatajoe*, No.9, 25 April, Thn II. Soerabaia: Modern Cannalaan, 1938, hal. 259-260.
- Djatajoe*, No 1, 25 Agustus, Thn IV. Soerabaia: Modern Cannalaan, 1939, hal. 15.
- Djatajoe*, No. 2. 25 Djoeli Thn ke-II.Soerabaia: Modern Cannalaan, 1938, hal 353-357.
- Djatajou*, No. 25 Djoeli 1938. *Tahoen Ke-2*. Koleksi Gedong Kertya, Singaraja.
- D. MacCennel.1999. *The Thourist-A New Theory of the Leisure Class*, 2 nd edn. Berkeley Californea: University of Californea Press..
- Gmelch, Sharon Bohn. 2004. *Tourist and Tourism: A Reader*. USA: Waveland Press Inc.
- Heitmeann, Sine. 2011. "Authenticity in Tourism" dalam P. Robinson, eds, *Research Theme for Tourism*, 2011.
- Johson, Doyle Paul. 1989, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1*, 1994, Jakarta: PT Gramedia.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi:Pokok-Pokok Etnografi*. Jilid II. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Post Modern: Teori dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



- Moll, H.J.E. *Memorie van Overgave van Den Aftrendend Residen Bali en Lombok 24 Mei 1941*. Koleksi Gedong Kertya, Singaraja.
- Nitobe, Inazo. 2012. *Bushido Jiwa Jepang*, Bandung: Era Media.
- Nooteboom (et.al.). 1948. *Oost Indonesie*. Groningen: J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij.
- Nordolt, Henk Schulte, Darma Putra, dan Helen Creese. 2006. *Seabad Puputan Badung: Perspektif Belanda dan Bali*. Jakarta: Pustaka Larasan.
- Panetja, I Gde. 1986. *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: CV Kayumas.
- Pendit, Njoman S. 1978. *Bali Berjuang*. Jakarta: Gunung Agung.
- Penjoeloeh Bali*. Djoem'at, 10 Djanuari 1947. Tahoen ke I No. 59. Denpasar: Redactie en Administratie Bali Drukkerij, hal I kolom 3-6, "Negara Indonesia Timoer Telah Lahir".
- Peraturan Daerah Provinsi Bali, Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Kepariwisata Budaya Bali*.
- Pichard, Michel. 2006. *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Jakarta: Perpustakaan Populer Gramedia.
- Pilliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas Batas Kebudayaan*. Bandung: Jalasutra.
- Pitana, I Gde. Putu G. Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Sendra, 1989. *Konfrensi Denpasar dan Pergolakan Politik Di Bali 1946-1950*. Skripsi S1. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Simon, Roger. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suastika, I Made. *Calon Arang dalam Tradisi Bali*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Takwin, Bagus. 2009. *Akar-Akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi dan Plato Hingga Bourdieu*. Jakarta: PT Gramedia.
- Urry, John. 2011. *The Tourist Gaze*. British: Saga Publication Ltd.
- Wertheim (ed.). 1960. *Bali: Studies in Life, Thought, and Ritual*. Amsterdam, W. van Hoeve.



Foto 3. Kantor Pariwisata Bali zaman Kolonial Belanda di Singaraja tahun 1928 (Foto: KITLV Leiden.)